

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM GOVERNANSI HUTAN  
LINDUNG DI KABUPATEN WONOSOBO**  
(Sebuah aplikasi Riset Tindakan Berbasis *Soft Systems Methodology*)

[darmanto@ut.ac.id](mailto:darmanto@ut.ac.id)

Universitas Terbuka

**Abstrak**

Kajian ini merupakan aplikasi riset tindakan berbasis *Soft Systems Methodology* dalam rangka governansi hutan lindung di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Selain Perum Perhutani yang memiliki kewenangan dalam governansi hutan lindung di Pulau Jawa, ada beberapa *stakeholder* lain yang terkait erat dengan governansi hutan lindung, seperti pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta lembaga yang dibentuk pemerintah seperti Tim Kerja Pemulihan Kawasan Dieng (TKPD) dan Forum Hutan Wonosobo (FHW). Dalam prakteknya, governansi dalam pengelolaan hutan lindung banyak menghadapi kendala, salah satunya adalah menyangkut implementasi kebijakan Perum Perhutani yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan seperti kesulitan masyarakat sekitar hutan lindung dalam memanfaatkan hasil hutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan yang secara *systematically desirable* dan *culturaly feasible* dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat desa hutan mengenai fungsi hutan lindung.

Kata Kunci: governansi, pengelolaan hutan lindung, Perum Perhutani, implementasi kebijakan

**Pendahuluan**

Hutan lindung mempunyai fungsi yang sangat penting karena berperan sebagai pengaturan tata air, pencegahan banjir, pencegahan erosi, dan pemeliharaan kesuburan tanah (Arief, 2001). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, pasal 1 menyatakan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Perhutani) menegaskan Perhutani mempunyai kewenangan untuk

mengelola hutan lindung (tidak termasuk hutan konservasi) khususnya yang berada di Pulau Jawa.

Kerusakan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo dimulai sejak era reformasi pada tahun 1998. Tujuan masyarakat merambah hutan adalah karena lahan pertanian yang lama sudah tidak subur lagi, sehingga dengan kondisi tersebut memaksa masyarakat untuk membuka lahan baru lagi dengan cara merambah hutan lindung tersebut (Zulaifah, 2007; Suara Merdeka Cyber News, 2007). Sampai saat ini perambahan hutan masih tetap terjadi dalam bentuk atau jenis yang lain, walaupun intensitas perambahannya tidak sebesar pada era Reformasi tahun 1998 tersebut. Masyarakat yang masih tetap melakukan perambahan hutan pada umumnya masih memiliki anggapan atau ekspektasi bahwa hutan lindung dapat ditanami serta diolah tanahnya, sehingga masyarakat bebas melakukan penanaman di hutan lindung tersebut. Padahal sesuai dengan fungsi hutan lindung, masyarakat dilarang mencangkul dan menanam tanaman semusim (wawancara dengan Nara Sumber, 12 Februari 2012).

Kebijakan maupun program yang dibuat oleh Perum Perhutani dalam prakteknya belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Keputusan Direksi Perhutani Nomor 682 tahun 2009 tentang PHBM ternyata berdampak kurang diharapkan oleh masyarakat desa hutan. Implikasi dari kebijakan tersebut sangat berdampak pada masyarakat desa hutan serta berjalannya program PHBM itu sendiri (Ketidakadilan PHBM, 2012). Murdiyanto (2008) menyatakan bahwa ketidakpahaman masyarakat mengenai peraturan PHBM kemungkinan disebabkan karena kurangnya sosialisasi, komunikasi dan pengenalan mengenai PHBM dan khususnya program *agrosilvikultur*. Masyarakat desa hutan melalui LMDH tidak pernah dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan yang dibuat Perhutani tersebut (Ketidakadilan PHBM, 2012). Ginoga, et al (2005: 229-230) menyatakan bahwa kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan hutan lindung adalah kebijakan yang jelas dan terarah antara yang dilarang dan dibolehkan, kesamaan persepsi tentang istilah yang berkaitan dengan kawasan hutan lindung, tidak adanya *overlapping* antara kebijakan, tidak adanya dualisme antara kebijakan, dan tidak adanya ego sektoral antara pembuat kebijakan, sehingga fungsi kawasan hutan lindung dan manfaatnya dapat dirasakan oleh para pihak yang terkait baik di pusat dan daerah secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa masalah implementasi kebijakan merupakan masalah yang harus segera dicari penyelesaiannya. Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan hutan lindung oleh karena itu dapat dianggap sebagai masalah

yang bersifat sistemik yang pendekatannya harus dilihat dari sudut perspektif keseluruhan (*adaptif whole*). Oleh karena itu sehubungan dengan permasalahan tersebut diusahakan suatu pendekatan yang lebih spesifik yaitu dengan menggunakan paradigma berpikir serba sistem (*systems thinking*) dengan mempertimbangkan relasi dan peran dari berbagai pihak yang terkait dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Perubahan yang diharapkan dari proses pembelajaran tersebut diharapkan memenuhi kriteria yang logis secara sistematis ( *systematically desirable*) dan dapat diterima secara budaya (*culturally feasible*). Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses penataan ulang menyangkut *problem solving interest* yang berlangsung secara partisipatif dan berbasis budaya menghasilkan optimalisasi implementasi kebijakan dalam pengelolaan hutan lindung di Perum Perhutani Kabupaten Wonosobo?

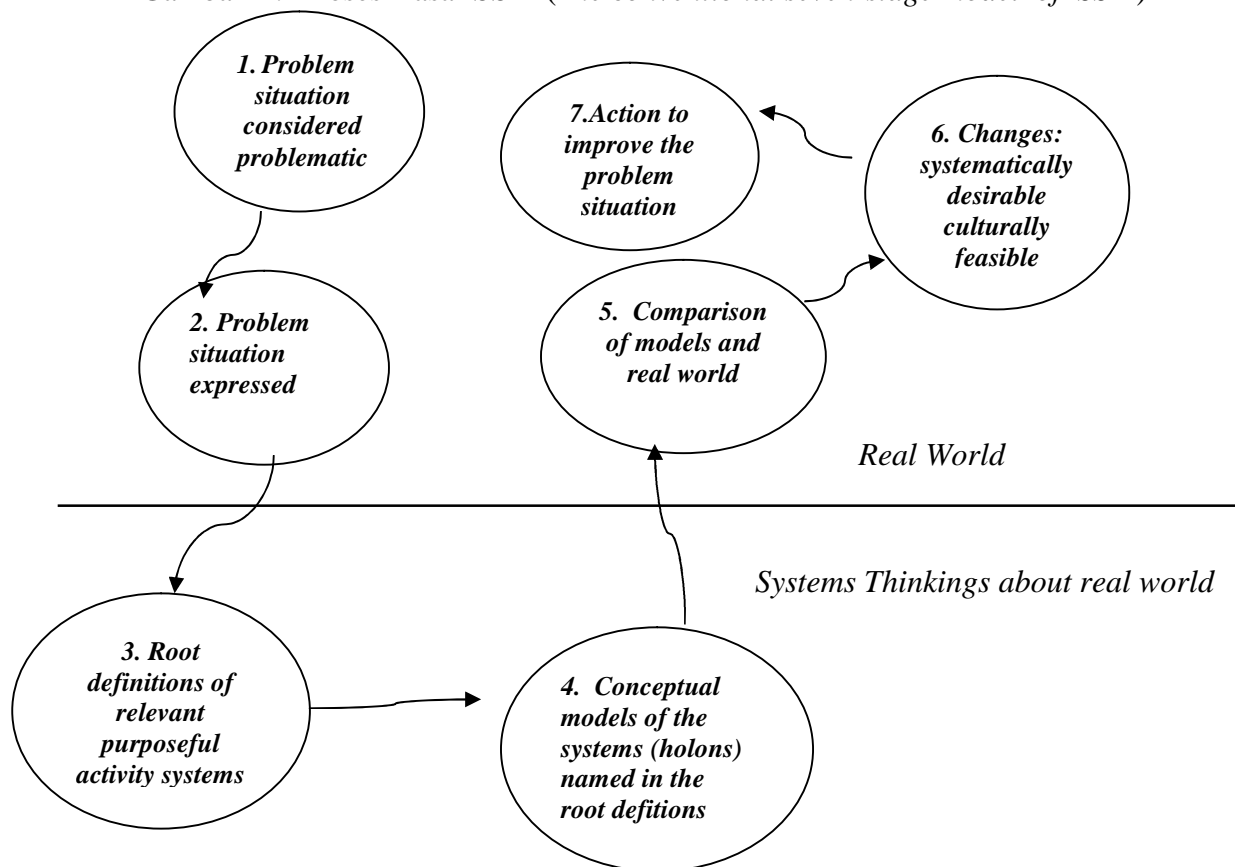
### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi serba sistem lunak (*soft systems methodology/SSM*). Pendekatan SSM tepat digunakan bagi penelitian yang memandang dunia (sosial) sebagai hal yang kompleks, problematik, misterius, dikarakteristikan oleh pertarungan sudut pandang (Checkland dan Poulter, 2006). Menyangkut teknik pengumpulan data, data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara secara mendalam (*in-depth interviews*), *Focus Group Discussion* (FGD), dan observasi. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi atau literature. Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari lapangan melalui wawancara mendalam dan direkam serta dilakukan transkrip untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dari rekaman tersebut. Data tersebut kemudian dibuat koding serta kategori-kategori data sehingga mempermudah dalam penganalisisan data. Tahap kesatu, data mentah yang telah dikumpulkan tersebut digunakan sebagai sebagai dasar dalam pelaksanaan tahap-tahap dalam SSM dari tahap 1 sampai dengan 6. Tahap kedua, melalui transkrip data, pembuatan koding, serta pengkategorisasian data. Dalam proses pelaksanaan tahapan 1 sampai dengan tahap 6 SSM, proses triangulasi selalu dilakukan. Teknik triangulasi dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembandingan data yang telah diperoleh dengan sumber data.

### **Tahapan SSM**

Proses SSM (Chekland dan Scholes, 1990) terdiri atas 7 (tujuh) tahapan kegiatan yang dikelompokkan ke dalam 2 ranah, yaitu ranah dunia nyata (*real world*) dan ranah berpikir serba sistem (*systems thinking about the real world*) seperti tampak dalam Gambar 1. 7 tahapan kegiatan tersebut adalah: (1) menemukan situasi permasalahan yang tidak terstruktur dengan baik; (2) Menstrukturkan situasi permasalahan; (3) Menentukan root definitions dari sistem yang relevan (4) Membuat model konseptual; (5) Membandingkan tahap 2 dan tahap 4 melalui komparasi model konseptual dengan situasi dunia nyata; (6) Menentukan perubahan yang diinginkan serta layak dilaksanakan ( *Changes systematically desirable, culturally feasible*); dan (7) Melakukan suatu tindakan untuk meningkatkan atau memperbaiki situasi masalah. Tahap 1 dan tahap 2 termasuk tahap pencarian (*finding out*). Tahap 6 dan tahap 7 termasuk dalam tahap melaksanakan tindakan (*taking action*). Tahap 1, tahap 2, tahap 5, tahap 6, dan tahap 7 merupakan *reality* atau *perception about real world*. Adapun tahap 3 dan tahap 4 merupakan tahap berpikir serba sistem (*systems thinking*) yang merupakan *actuality* atau *feeling about real world*.

Gambar 1. Proses Dasar SSM (*The conventional seven-stage model of SSM*)

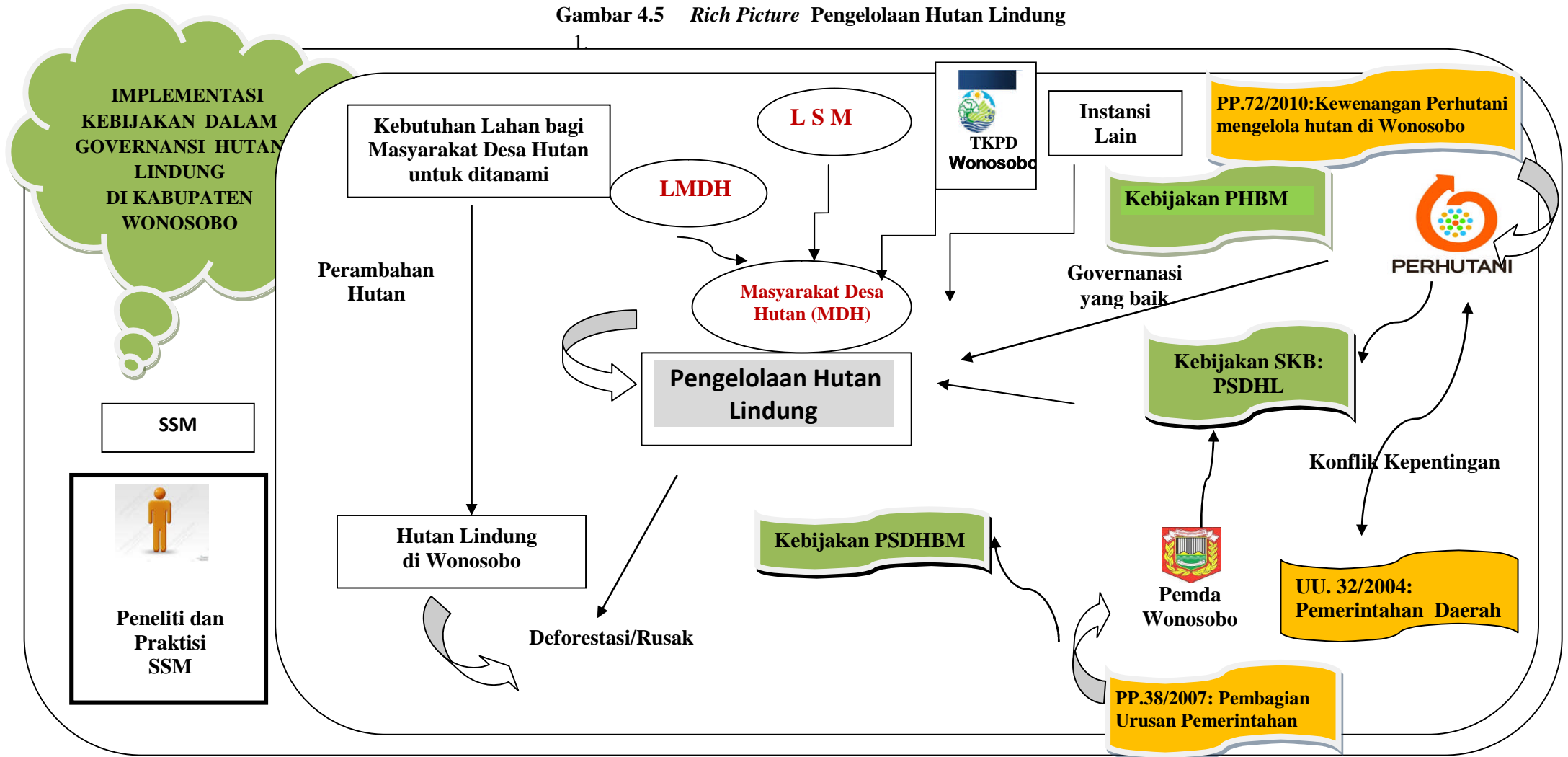


Sumber: Checkland and Scholes, 1990.

**Rich Picture**

Ada tiga analisis dalam membuat *rich picture* yaitu (a) Analisis Satu yang menyangkut Analisis Intervensi, (b) Analisis Dua yang menyangkut Analisis yang berfokus pada aspek Sosial yang melibatkan aspek peran, norma, dan nilai, dan (c) Analisis Tiga yang berfokus pada Analisis Politik yang menyangkut struktur *power* (Checkland dan Poulter, 2006).

Gambar 4.5 Rich Picture Pengelolaan Hutan Lindung



### ***Root definitions dari sistem yang relevan***

Alat bantu yang tepat untuk menganalisis *root definitions* adalah kata CATWOE : C (*Customer*), A (*Actors*), T (*Transformation*), W ( *Worldview* atau *Weltanschauung*), O ( *Owners*), dan E (*Environmental Constraints*). Setelah dilakukan analisis satu sampai analisis tiga serta analisis CATWOE, maka diteruskan dengan menguji seberapa jauh model yang dihasilkan memberikan hasil yang optimal. Checkland dan Poulter (2006) menyatakan bahwa perlu adanya kriteria menyangkut pengukuran kinerja bekerjanya sistem aktivitas yang punya maksud tersebut yaitu (1) *Efficacy*, (2) *Efficiency*, dan (3) *Effectiveness*. Pada *the Stream of Logic-Based Enquiry* analisisnya berbasis logika yang berlangsung pada tahap berpikir serba sistem tahap 3 dan tahap 4 dari SSM. Adapun kategori *The Stream of Cultural Enquiry* yang telah dijelaskan di bagian awal berlangsung pada tataran dunia nyata yang berlangsung pada tahap 1, 2, 5, 6, dan 7 (Checkland dan Scholes, 1990). Pada tahap 3 dan tahap 4 dari *The Stream of Logic-Based Enquiry* ini sebagai tahapan berpikir serba sistem mengenai dunia nyata yang menyangkut tahap pemilihan dan penamaan sistem aktivitas manusia yang relevan (*Relevant Purposeful Activity Systems* ) serta tahap pembuatan model konseptual (*Conceptual Model*).

### ***Root Definitions of Relevant Purposeful Activity Systems***

Pada tahap 3 ini dibuat *root definition of relevant system* sebagai suatu deskripsi terstruktur dari sebuah sistem aktivitas manusia yang relevan dengan situasi problematis yang menjadi perhatian di dalam penelitian ini (Hardjosoekarto, 2012).

Agar *root definition* benar-benar dapat dipakai sebagai dasar dalam pembuatan model konseptual, maka perlu dicek dengan menggunakan alat bantu analisis CATWOE, sehingga *root definition* benar-benar mampu menggambarkan sebuah sistem aktivitas manusia yang punya maksud yang relevan yang kita pilih. CATWOE merupakan singkatan dari *Customers* (C), *Actors* (A), *Transformation Process* (T), *Worldview* (W), *Owners* (O), *Environment Constraints*(E). Selain itu juga digunakan kriteria kinerja 3E yaitu: 1) Efikasi, 2) Efisiensi, dan 3) Efektivitas. Efikasi mengacu kepada keberhasilan transformasi T dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun kriteria Efisiensi merujuk kepada pemakaian sumberdaya yang minimum dalam mencapai proses transformasi T. Sedangkan kriteria Efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan jangka panjang yang lebih baik yang disebabkan oleh transformasi T. Ketiga kriteria tersebut digunakan dalam pengawasan terhadap kinerja dari seluruh tahapan kegiatan dari suatu sistem aktivitas yang punya maksud yang tujuannya adalah untuk pelaksanaan kontrol terhadap aktivitas kegiatan tersebut.

Di bawah ini adalah CATWOE sebagai alat uji atau analisis untuk *Root Definition* tentang Pemahaman Masyarakat yaitu: “ Sistem yang dimiliki Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah untuk menghasilkan kebijakan (P) melalui pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Perum Perhutani (Q) dalam rangka menjamin optimalisasi implementasi kebijakan pengelolaan hutan lindung (R). Analisis CATWOE untuk *Root Definition* Implementasi Kebijakan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 CATWOE dan 3E dalam *Root Definition*: Pemahaman Masyarakat

<i>Customers (C)</i>	Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah; Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Dinas Kehutanan dan Perkebunan ),Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD); Pihak yang berkepentingan ( <i>stakeholder</i> ) (Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Donor, Usaha Swasta); Forum Hutan Wonosobo (FHW); Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
<i>Actors (A)</i>	Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah
<i>Transformation Process (T)</i>	Terwujudnya implementasi kebijakan Perum Perhutani yang maksimal melalui komunikasi dan interaksi antarinststitusi yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung; penjelasan mengenai harapan-harapan yang akan dipenuhi sekaligus juga mampu memenuhi komitmen yang sudah diikrarkan; penyampaian informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan <i>stakeholder</i> ; pemberdayaan SDM Perum Perhutani mencakup sikap, ketrampilan, dan budaya; jaminan kualitas pelayanan dalam bentuk standarisasi pelayanan, monitoring, dan evaluasi ; penyediaan pedoman dan prosedur pelayanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> dalam rangka menjamin governansi yang baik dalam pengelolaan hutan lindung.
<i>Worldview (W)</i>	Tercapainya implementasi kebijakan Perum Perhutani secara maksimal sangat penting dalam rangka menjamin governansi yang baik dalam pengelolaan hutan lindung
<i>Owners (O)</i>	Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah
<i>Environmental Constraints (E)</i>	Keterbatasan sumber daya yang dimiliki Perum Perhutani, terbatasnya sumberdaya yang ada dalam masyarakat desa hutan (MDH), Fungsi LMDH belum maksimal, kebijakan Perum Perhutani yang belum sesuai



	dengan kebutuhan masyarakat. Sarana dan prasarana yang belum memadai. Kondisi-kondisi tersebut dapat menyebabkan kendala bagi terwujudnya implementasi kebijakan yang maksimal dalam pengelolaan hutan lindung.	
Menetapkan kriteria kinerja melalui 3E.	E-Efikasi/ Keberlangsungan	Misi dan tujuan kebijakan pengelolaan hutan lindung Perum Perhutani, sumber daya Perum Perhutani; peran serta masyarakat desa hutan (MDH) dan <i>stakeholder</i> untuk berpartisipasi; kemudahan prosedur bagi masyarakat desa hutan dan <i>stakeholder</i> untuk berpartisipasi; situasi dan kondisi lingkungan yang kondusif akan membantu mewujudkan implementasi kebijakan yang maksimal dalam rangka menjamin tercapainya governansi hutan lindung yang baik di Kabupaten Wonosobo.
	E-Efisiensi	Penggunaan sumber daya manusia dan anggaran Perum Perhutani mengingat luasnya wilayah hutan lindung. Menggunakan fasilitas dan sarana Perum Perhutani.
	E-Efektivitas	Terwujudnya implementasi kebijakan Perum Perhutani yang maksimal dalam rangka menjamin tercapainya governansi hutan lindung yang baik di Kabupaten Wonosobo.

Sumber: Olahan Peneliti, 2014

Dalam proses transformasi, terkait dengan terwujudnya implementasi kebijakan Perum Perhutani yang maksimal melalui komunikasi dan interaksi antarinstansi yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung; penjelasan mengenai harapan-harapan yang akan dipenuhi sekaligus juga mampu memenuhi komitmen yang sudah diikrarkan; penyampaian informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan *stakeholder*; pemberdayaan SDM Perum Perhutani mencakup sikap, ketrampilan, dan budaya; jaminan kualitas pelayanan dalam bentuk standarisasi pelayanan, monitoring, dan evaluasi ; penyediaan pedoman dan prosedur pelayanan kepada masyarakat dan *stakeholder* dalam rangka menjamin governansi yang baik dalam pengelolaan hutan lindung.

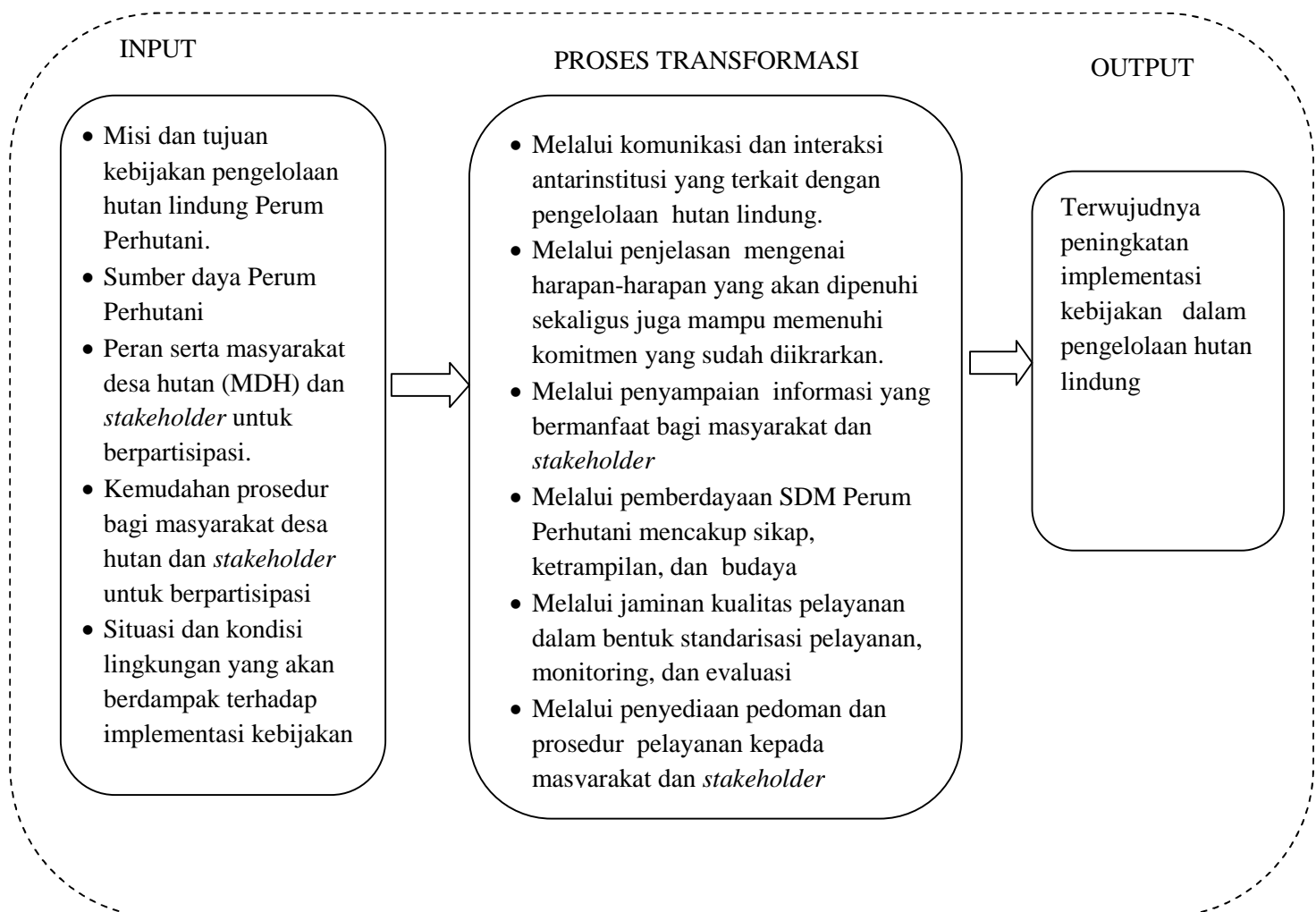
Dalam rangka proses transformasi untuk memaksimalkan implementasi kebijakan di antara pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung melalui pemahaman masyarakat mengenai implementasi kebijakan tersebut dalam pengelolaan hutan lindung memiliki hambatan (E: *Environmental Constraints*) khususnya menyangkut birokrasi dan sumber daya manusia. Birokrasi kadang menghambat masyarakat dalam menjalankan implementasi kebijakan Perhutani seperti disampaikan oleh salah satu ketua LMDH yang

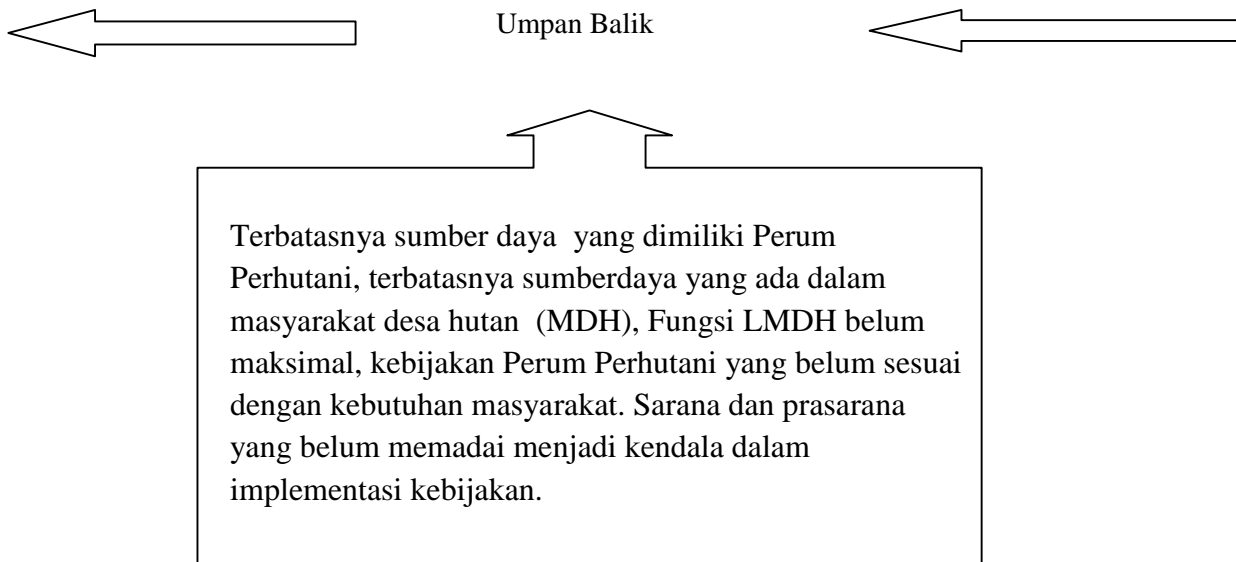
mengatakan bahwa sudah lama proses tentang Perjanjian Kerja Sama (PKS) tapi hasilnya belum nampak. Hambatan lain adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia seperti disampaikan oleh staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo yang menyatakan bahwa terdapat keterbatasan dalam hal personel LMDH sehingga terkadang mereka menyalahi kesepakatan bersama.

Dalam aspek efikasi dilihat sejauh mana pencapaian dari keberlangsungan kegiatan implementasi kebijakan Perhutani. Efisiensi terkait dengan sejauh mana penggunaan sumberdaya dapat dibuat secara minimum mungkin (sumberdaya manusia dan anggaran) dalam rangka implementasi kebijakan dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Adapun efektivitas menyangkut ketercapaian secara maksimal implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Perhutani terkait dengan pengelolaan hutan lindung. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangkaian tindakan kontrol atas kinerja dari proses transformasi yang berlangsung melalui berbagai aktivitas kegiatan, agar kinerja kegiatan-kegiatan tersebut tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Adapun proses perubahan atau transformasi implementasi kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Proses Transformasi Implementasi Kebijakan





### Membangun Model Konseptual (*Conceptual Model of the Systems Named in the Root Definition*)

Tabel 2. Kegiatan Sistem: Pemahaman Masyarakat

1	Menetapkan aparat Perhutani yang berhubungan dengan implementasi kebijakan
2	Memastikan pengetahuan dan pemahaman aparat Perhutani mengenai kebijakan yang diimplementasikan
3	Mengidentifikasi <i>stakeholder</i> yang memerlukan sosialisasi mengenai kebijakan pengelolaan hutan lindung
4	Menyiapkan kebijakan yang akan disosialisasikan
5	Mempertimbangkan anggaran untuk implementasi kebijakan
6	Merancang media yang tepat untuk kelancaran penyebaran (diseminasi) kebijakan kepada <i>stakeholder</i>
7	Membuat modul atau panduan sosialisasi kebijakan
8	Menyusun jadwal rangkaian sosialisasi peraturan dan program
9	Melakukan sosialisasi kebijakan kepada <i>stakeholder</i>

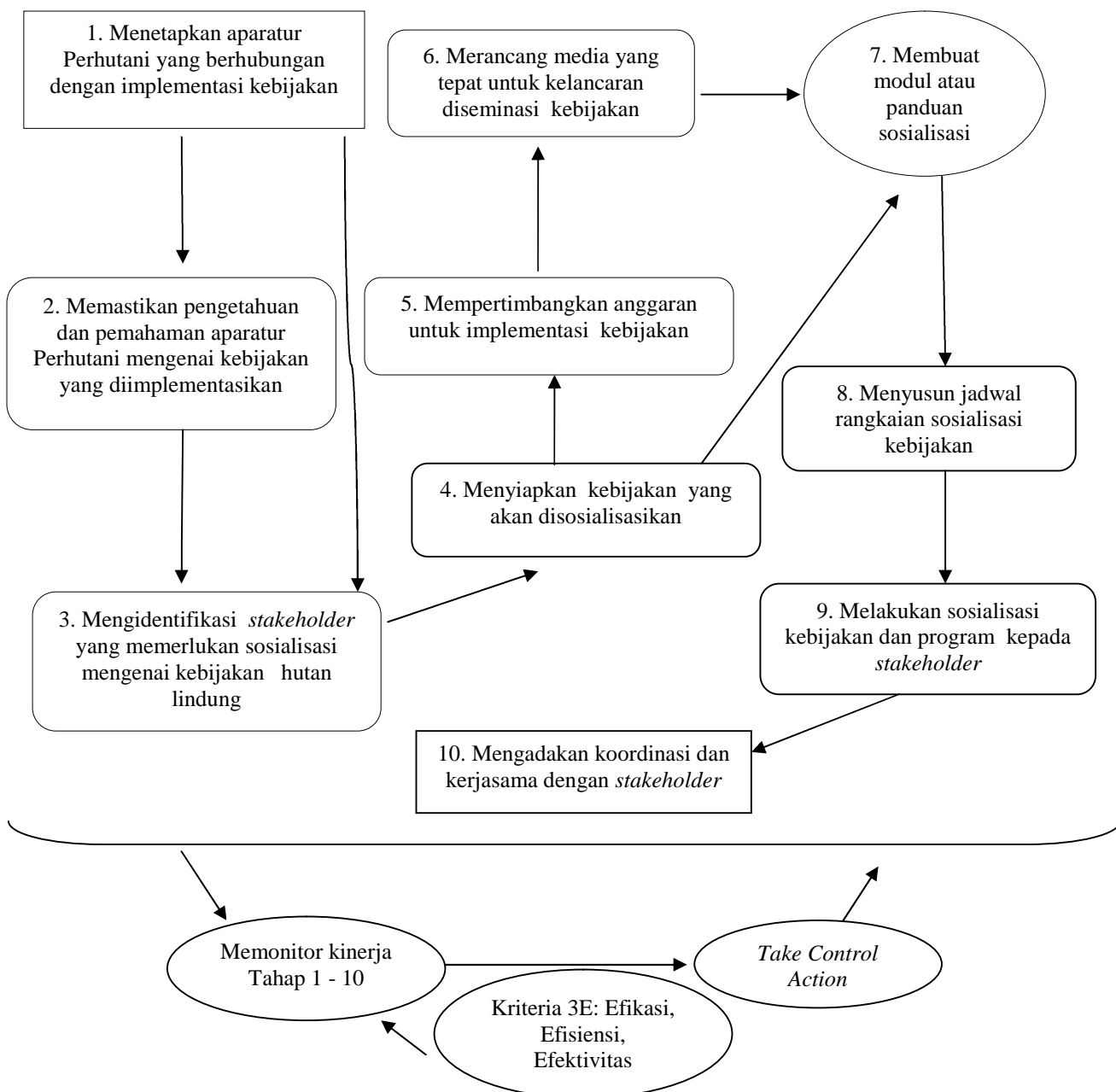
10	Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan <i>stakeholder</i>
----	---

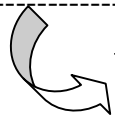
Sumber: Olahan Peneliti, 2014

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka di bawah ini digambarkan model konseptual yang dibuat berdasarkan aktivitas-aktivitas dalam Sistem Pemahaman Masyarakat, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2. Model Konseptual Sistem Pemahaman Masyarakat

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURANG MAKSIMAL**





## {IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LEBIH MAKSIMAL}

Sumber: Olahan Peneliti, 2014

### Pembahasan Hasil Penelitian

Pada ini dilakukan uraian langkah ke 5 dari SSM mengenai perbandingan model konseptual terhadap situasi dunia nyata menyangkut sistem Pemahaman Masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung.

**Tabel 3. Perbandingan Model Konseptual dengan Situasi Dunia Nyata  
Sistem : Pemahaman Masyarakat**

No	Aktivitas Model Konseptual	Dunia Nyata				Alternatif Tindakan
		Keberadaannya?	Bagaimana?	Siapa?	Baik/Jelek?	
1	Menetapkan aparatur Perhutani yang berhubungan dengan implementasi kebijakan	Ada	Rapat Internal	KPH Kedu Utara BKPH WOnosobo	Kurang Optimal	Tingkat pendidikan dan pengetahuan aparatur Perhutani yang memadai dalam rangka implementasi kebijakan Perhutani
2	Memastikan pengetahuan dan pemahaman aparatur Perhutani mengenai kebijakan yang diimplementasikan	Ada	Rapat Internal	KPH Kedu Utara	Sudah Optimal	Menyiapkan aparatur Perhutani yang memiliki pemahaman mengenai kebijakan Perhutani
3	Mengidentifikasi <i>stakeholder</i> yang memerlukan sosialisasi mengenai kebijakan pengelolaan hutan lindung	Ada	Rapat Internal	LMDH Pemerintah Daerah LSM Organisasi nonpemerintah(Ornop)	Sudah Optimal	Menelaah <i>stakeholder</i> yang terkait dengan sosialisasi kebijakan Perhutani
4	Menyiapkan kebijakan yang akan disosialisasikan	Ada	Rapat Internal	KPH Kedu Utara	Sudah optimal	Menelaah dokumentasi berkaitan dengan sosialisasi kebijakan

No	Aktivitas Model Konseptual	Dunia Nyata				Alternatif Tindakan
		Keberadaannya?	Bagaimana?	Siapa?	Baik/Jelek?	
5	Menyiapkan anggaran untuk implementasi kebijakan	Ada	Pengajuan Anggaran	KPH Kedu Utara	Kurang Optimal	Menambah anggaran sehingga implementasi kebijakan Perhutani dapat terlaksana dan tepat sasaran
6	Merancang media yang tepat dalam rangka penyebarluasan (diseminasi) kebijakan kepada <i>stakeholder</i>	Ada	Rapat Internal	KPH Kedu Utara BKPH WOnosobo	Kurang optimal	Melakukan kajian sasaran/obyek/orang yang akan diberikan informasi
7	Membuat modul atau panduan sosialisasi kebijakan	Ada	Rapat Internal	KPH Kedu Utara	Perlu Perbaikan	Harus ada gambaran yang komprehensif mengenai diseminasi kebijakan, menyangkut materi, sasaran, dsb.
8	Menyusun jadwal rangkaian sosialisasi kebijakan	Ada	Rapat Internal	KPH Kedu Utara BKPH WOnosobo	Kurang optimal	Perlu kajian yang lebih komprehensif mengenai sosialisasi sehingga jadwal dapat terlaksana dan tepat sasaran
9	Melakukan sosialisasi kebijakan <i>stakeholder</i>	Ada	Rapat Koordinasi	KPH Kedu Utara BKPH WOnosobo RPH Wonosobo	Belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih memperhatikan jadwal yang telah tersusun</li> <li>• Memperhatikan obyek/orang yang akan disosialisasikan sehingga obyek/orang dapat memahami</li> <li>• Melakukan pendekatan secara individual sehingga sosialisasi tepat sasaran</li> </ul>
10	Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait dengan implementasi	Ada	Rapat Koordinasi	LMDH Pemerintah Daerah LSM Organisasi	Belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perhutani lebih memahami permasalahan <i>stakeholder</i></li> <li>• Perhutani lebih memahami kebutuhan <i>stakeholder</i></li> </ul>

No	Aktivitas Model Konseptual	Dunia Nyata				Alternatif Tindakan
		Keberadaannya?	Bagaimana?	Siapa?	Baik/Jelek?	
	kebijakan dari Perhutani			nonpemerintah(Ornop)		Perhutani mencari cara dan metode koordinasi yang tepat

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2014

Tabel 4. *Systematically Desirable dan Culturally Feasible* Menyangkut Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Hutan Lindung

No	Nama RDs	<i>Desirable?</i>	<i>Feasible?</i>	<i>Possible Action</i>
1	Implementasi Kebijakan melalui Pemahaman Masyarakat	Mengembangkan konsep pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan program Perhutani	Ya, merancang media yang tepat dalam rangka sosialisasi program Perhutani	Peningkatan kualitas SDM masyarakat desa hutan (MDH)

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2014

Dalam kaitan dengan *Root Definitions* Pemahaman Masyarakat, Akib (2010:6) menyatakan bahwa ada empat syarat pengelolaan diseminasi kebijakan, yakni: 1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah yang mempunyai kewenangan membuat peraturan; 2) adanya kesadaran masyarakat untuk menerima serta melaksanakan kebijakan; 3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; dan 4) pemahaman bahwa meskipun pada awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun seiring dengan perjalanan waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar dilaksanakan.

Pemahaman masyarakat mengenai suatu kebijakan juga sangat penting untuk terlaksananya implementasi kebijakan tersebut seperti disampaikan oleh Baedhowi (2004) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik memerlukan beberapa faktor penting agar dapat berjalan dengan baik, salah satunya yaitu sasaran kebijakan publik yang mampu merespon dengan baik dan berpartisipasi aktif terhadap kebijakan yang telah

dilaksanakan. sasaran kebijakan publik dapat bermacam-macam, di antaranya adalah masyarakat dalam suatu wilayah tertentu yang terkena implementasi kebijakan tersebut. FAO-UN (2010) menjelaskan bahwa proses secara partisipatif *bottom-up* yang menggunakan lokakarya multipihak adalah cara yang tepat untuk mengembangkan suatu implementasi kebijakan yang bermanfaat. Pemerintah tidak harus bekerja sendirian namun pemerintah perlu mempromosikan dan memfasilitasi implementasi kebijakan, sesuai dengan tanggung jawab yang terkait dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan dalam rangka pengelolaan hutan lindung, perubahan yang secara sistem diinginkan atau diharapkan adalah melakukan pengembangan suatu pola atau konsep pemahaman masyarakat terhadap kebijakan atau program Perhutani terkait dengan pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Perubahan yang secara sistem dapat dilakukan terkait dengan implementasi kebijakan Perhutani dalam pengelolaan hutan lindung adalah merancang media atau sarana yang tepat dalam rangka sosialisasi kebijakan program Perhutani kepada masyarakat. Adapun langkah atau tindakan yang mungkin dapat dilakukan oleh Perhutani dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat adalah melalui peningkatan kualitas SDM masyarakat desa hutan (MDH). Dengan peningkatan pemahaman masyarakat desa hutan maka fungsi hutan lindung bagi kemaslahatan manusia dapat tetap terjaga disamping menjaga keharmonisan hubungan dengan Perum Perhutani sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan hutan lindung.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyatakan: “Di tingkat LMDH sendiri, secara kelembagaan LMDH belum kuat semua, di Wonosobo semua Desa sudah ber LMDH semua, tapi hanya formalitas.” Hal yang senada disampaikan oleh anggota Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD) Kabupaten Wonosobo yang mengungkapkan: “Cuma yang jadi masalah antara keinginan masyarakat dengan keinginan Negara dalam hal ini adalah Perhutani adalah berbeda, kalau masyarakat inginnya bebas menanam, tapi bagi Perhutani atau Negara, sudah ada aturan mainnya.” Weiland (2010) mengatakan bahwa banyak negara berkembang masih memiliki kendala menyangkut dana dan sumber daya manusia yang memadai untuk menyiapkan dan mengimplementasikan rencana pengelolaan hutan. Menurut Dwidjowiyoto (2005) inti permasalahan dalam implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan yang dibuat disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian dalam implementasi kebijakan diperlukan sumber daya yang memadai sehingga program yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung dapat berjalan dengan baik.



## Kesimpulan dan Rekomendasi

Kajian mengenai penataan ulang governansi menunjukkan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Perum Perhutani sehingga dapat meningkatkan peran masyarakat desa hutan untuk menjaga kelestarian fungsi hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Namun hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi hutan lindung belum maksimal. Masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di sekitar wilayah hutan lindung yang merugikan fungsi dan peran hutan lindung. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya penyampaian informasi dan sosialisasi khususnya dari Perum Perhutani kepada masyarakat desa hutan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat dirumuskan rekomendasi dimana sehubungan dengan optimalisasi implementasi kebijakan dalam pengelolaan hutan lindung maka diperlukan adanya peningkatan kualitas SDM masyarakat desa hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1. Hal. 1-11
- Arief, Arifin. (2001). *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Baedhowi. (2004). *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan. Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta*. Universitas Indonesia: Disertasi
- Checkland, Peter and Scholes, Jim. (1990). *Soft Systems Methodology in Action*. England: Jhon Wiley & Sons Ltd.
- Checkland, Peter and Poulter, John. (2006). *Learning for Action: A Short Definitive Account of Soft Systems Methodology and its use for practitioners, Teachers, and Students*. JohnWiley and Sons, Ltd, Chichester.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2005). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- FAO-UN. (2010). *State of the World's Forests*.
- Ginoga, Kirsfianti L., dkk. (2005). Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung. *Jurnal Penelitian Sosial & Ekonomi* Vol. 2 No. 2 Juli , hal 203 -232
- Ketidakadilan PHBM. (2013). <http://arupa.or.id/ketidakadilan-phbm/>. Diunduh 9 Nopember 2013.

Murdiyanto, Eko. (2008). Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Kearifan Lokal: Suatu Konsep untuk Pengentasan Kemiskinan, dalam *Pendidikan Agroforestry Sebagai Strategi Menghadapi Pemanasan Global*. Prosiding Seminar Fakultas Pertanian UNS. Hal. 255-265

Suara Merdeka Cyber News. Minggu, 11 Maret 2007.  
<http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0703/11/dar32.htm>. diunduh tanggal 4 Februari 2013.

Weiland, Sabine. (2010). Change in forest governance in developing countries. In search of sustainable governance arrangements. *International Journal of the Commons*. Vol 4, No 2.

Zulaifah, Siti. (2007). Rehabilitasi Lahan Hutan dan Pertanian Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025. *Majalah Kehutanan Indonesia*. Edisi I.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.